

## Siswa SD 002 Menumpang di Sekolah Lain



Sumber gambar: *Tribun Kaltim*

Sabtu, 11/01/2025

- **Proyek Pembangunan Sekolah Belum Rampung**

**BONTANG, TRIBUN** - Ketua Komisi A DPRD Bontang, Heri Keswanto terlibat adu argumen dengan konsultan proyek pembangunan SD 002 Bontang Barat saat melakukan peninjauan lapangan bersama anggota dewan lainnya, Jumat (10/1/2025).

Perdebatan terjadi saat pihak kontraktor dan konsultan proyek CV Surya Jaya Kontruksi, mengklaim progres pekerjaan sudah mencapai 92 persen. Namun, Heri meragukan angka tersebut setelah melihat langsung kondisi bangunan di lokasi.

"Kalau dilihat secara langsung saya rasa belum sampai 90 persen. Masih banyak yang perlu diperbaiki terutama di bagian struktur dan *safety* bangunan," ujar Heri. Saat melihat langsung, Heri mendapati lantai dasar bangunan dua lantai tersebut memang hanya menyisakan tahap *finishing*.

Namun, lantai dua masih jauh dari selesai. Sekat ruangan belum terpasang sempurna dengan material seperti batako merah, pasir, dan semen yang masih berserakan. Di area luar ekskavator kecil terlihat masih meratakan lahan untuk persiapan pemasangan *paving block*.

Heri juga menyoroti lemahnya pengawasan dari pihak konsultan. Ia mengaku sempat meminta laporan harian proyek senilai Rp6 miliar tersebut, namun tidak mendapat bukti fisik yang memadai.

"Tadi saya tanya soal laporan harian katanya ada, tapi waktu diminta ditunjukkan tidak ada bukti fisiknya. Seharusnya setiap hari ada catatan yang jelas, progres pagi, siang, sore," tegasnya.

Heri menambahkan jika pengawasan lebih ketat, kesalahan dalam pengerjaan bisa diminimalisir lebih awal. Ia juga mengingatkan bahwa kontraktor dan pemerintah sama-sama dirugikan dengan keterlambatan ini.

"Kontraktor punya tanggung jawab tapi konsultan juga harus profesional. Jangan sampai proyek yang dibiayai dengan dana publik tidak sesuai harapan," terangnya.

Kepala SD 002 Bontang Barat, Suhartini mengaku kecewa dengan keterlambatan proyek ini karena berdampak pada proses belajar mengajar.

"Bangunan ini rencananya ada delapan ruang kelas dari kebutuhan total 12 ruangan termasuk ruang guru. Tapi yang selesai baru delapan, jadi sebenarnya masih kurang," jelasnya. Ia menambahkan kekurangan ruang belajar tersebut membuat sekolah harus menunda memindahkan muridnya ke sekolah baru itu.

"Karena belum selesai, sekarang siswa kami yang 246 orang masih menumpang belajar di SD 001 Bontang Barat," ungkapnya. Suhartini berharap proyek ini segera dirampungkan agar kegiatan belajar mengajar bisa berjalan normal. **(mrd)**

**Sumber berita:**

1. Tribun Kaltim, Siswa SD 002 Menumpang di Sekolah Lain, 11/01/25

**Catatan:**

1. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang Dilaksanakan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Permen PUPR 1/2023), pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai kewenangan melakukan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi.
2. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Permen PUPR 1/2023, pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota meliputi:
  - a. kegiatan konstruksi yang dibiayai dengan dana APBD kabupaten/kota;
  - b. kegiatan konstruksi yang dibiayai dengan dana non APBN/APBD kecuali yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi; dan
  - c. pengawasan tertib usaha jasa konstruksi dalam rangka pembinaan jasa konstruksi terhadap segmentasi pasar yang:
    - 1) berisiko sedang, berteknologi madya, dan/atau berbiaya sedang; dan
    - 2) berisiko kecil, berteknologi sederhana, dan/atau berbiaya kecil.
3. Berdasarkan Pasal 6 Permen PUPR 1/2023, pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan pengawasan teknis terhadap:
  - a. tertib usaha jasa konstruksi;
  - b. tertib penyelenggaraan jasa konstruksi; dan/atau
  - c. tertib pemanfaatan produk jasa konstruksi.